

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Berdasarkan pada asas otonomi daerah maka hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2000 setelah adanya krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997 hingga 1998. Diberlakukannya otonomi daerah tersebut memungkinkan daerah yang bersangkutan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal itu menunjukkan bahwa otonomi daerah memiliki peran yang penting sehingga perlu dikelola dan dijaga dengan baik.

Pengendalian internal dalam suatu organisasi perusahaan, lembaga organisasi profit maupun nonprofit mutlak menjadi hal utama dan sangat dibutuhkan karena kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasi dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam

setiap pelaksanaan kegiatannya. Pengendalian internal sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Sistem pengendalian internal ini mengatur bagaimana seharusnya pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilakukan demi tercapainya tujuan pemerintah tanpa bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. Pemerintah harus melaksanakan sistem pengendalian dalam organisasi agar mendapatkan kinerja pemerintahan yang baik dan dapat menciptakan *good governance*.

Berkaitan dengan sektor pemerintahan, pendekatan dari sistem pengendalian intern pada Pemerintah Pusat dan daerah berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pengendalian intern tidak hanya memeriksa kebenaran angka-angka, tetapi juga memperhatikan struktur organisasi perusahaan atau instansi, meningkatkan efisiensi kinerja dan menganalisis keberhasilan dari suatu kebijakan manajemen. Maka dari itu, pengendalian internal harus dimonitor dan dievaluasi agar manfaat dari pengendalian internal tersebut berhasil serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada penelitian sebelumnya oleh Damayanti, et al (2020) yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang), menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal di Dinas Kominfo Kab. Semarang telah sesuai dengan unsur-unsur SPIP berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti kelebihan siswa magang yang

diterima, tidak semua pegawai yang melakukan tugas pokok pengawasan, penganggaran dan perencanaan berlatar belakang pendidikan ekonomi, khususnya akuntansi, dan fasilitas gudang untuk dokumen dan barang-barang yang kurang efisien. Sulitiantoro (2020) tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Guna Optimalkan Pengelolaan Retribusi Parkir, dijelaskan bagaimana retribusi parkir Stadion sepak bola Sultan Agung dapat menjadi pendapatan daerah jika dikendalikan dan dikelola dengan baik.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DISDAGKOP) Kabupaten Magelang merupakan salah satu instansi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Magelang yang mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, koperasi dan metrologi serta pembantuan tugas yang diberikan oleh daerah. DISDAGKOP sebagai instansi yang melaksanakan tugas-tugas otonomi, memiliki visi misi yang diselaraskan dengan visi misi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya masih terdapat ketidaksesuaian.

Peran pemerintah tentu sangat diperlukan yaitu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kegiatan operasional pemerintahan. Selain dari pengawasan pemerintah, upaya perbaikan struktur dan sistem juga dapat menjadi faktor lain agar kinerja pemerintahan juga semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Subbagian Keuangan DISDAGKOP Kabupaten Magelang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan sebelumnya, maka dapat terbentuk suatu rumusan masalah yaitu belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah yang di terapkan oleh subbagian keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DISDAGKOP) Kabupaten Magelang sehingga pendapatan asli daerah yang di dapat masih belum optimal dan belum terciptanya kinerja yang baik.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas dapat kita simpulkan bahwa permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah yang dilakukan oleh subbagian keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DISDAGKOP) Kabupaten Magelang, apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur PP No. 60 Tahun 2008 ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah yang dilakukan oleh subbagian keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

(DISDAGKOP) Kabupaten Magelang berdasarkan unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah menurut PP No.60 Tahun 2008.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan sistem pengendalian internal pemerintah.
2. Serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dibangku kuliah.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan yang lebih mendalam mengenai akuntansi sektor publik khususnya dalam instansi pemerintahan dan pengetahuan tentang sistem pengendalian internal pemerintah.

#### **2. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Laporan**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yang ingin mendalami akuntansi sektor publik, khususnya terkait sistem pengendalian internal di pemerintahan.
- b. Bagi pembaca diharapkan proposal ini dapat menambah wawasan baru.

3. Bagi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan yang dapat digunakan pihak-pihak yang ingin mempelajari tentang sistem pengendalian internal pemerintah.

4. Bagi Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi, khususnya dalam mengelola sistem pengendalian internal guna terciptanya *good governance*.

### **1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Untuk menghindari meluasnya masalah dalam penelitian, maka perlu untuk dilakukan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Magelang.
2. Penelitian ini difokuskan pada sistem pengendalian internal pemerintah.

Bagaimana sistem pengendalian internal pemerintah yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Magelang guna terciptanya lingkungan pemerintahan yang baik (*good governance*).